

## Dukungan Pansus Aset Makin Menguat

PONTIANAK. Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap aset Pemprov Kalbar belum rampung. DPRD Kalbar masih menunggu hasil tersebut untuk segera membentuk Pansus Aset.

Ketua Fraksi PPP DPRD Kalbar, HM Ali Akbar AS, SH menegaskan, dari awal pihaknya sangat berkeinginan untuk membenahi aset milik pemerintah provinsi yang selama ini proses penataan, pencatatan dan pengelolaan aset belum terlaksana dengan baik.

"Kita mendukung pembentukan Pansus Aset. Sehingga semua persoalan aset ini menjadi jelas. Tidak ada lagi aset yang tidak terdata, begitu juga dengan pemanfaatan aset menjadi lebih jelas," kata politisi daerah pemilihan Kota Pontianak ini kepada Equator, kemarin (24/9).

Menurut Ali Akbar, pengelolaan aset harus melalui pemantapan manajemen aset dan tertib administrasi, serta kepastian hukum. Hal itu guna memperjelas barang milik daerah yang selama ini masih ditemukan kerancuan.

Artinya, sambung dia, diperlukan landasan hukum pengelolaan yang baik dengan asas

■ Halaman 7

tangung jawab, asas kemanfaatan, asas keadilan, akuntabilitas, transparansi dan asas nilai ekonomi. Perlu diatur lebih jauh kerja sama pemanfaatan barang, dalam hal ini penggunaan dan pengoperasian daya guna dan hasil gunanya dalam memperoleh pendapatan daerah.

Selain itu, Ali Akbar mengatakan, pengelolaan aset perlu diatur mulai dari penyusunan perencanaan kebutuhan barang terkait dengan penganggaran belanja barang.

Sedangkan pelaksanaan pengadaan sampai pelaporannya merupakan implementasi realisasi belanja barang pada APBD. Hasil penghitungan nilai aset itu akan dituangkan melalui neraca daerah pada pos aktiva tetap yang setiap tahunnya diaudit BPK. "Hal ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi," tegas dia.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Sy Izhar Asyuri menegaskan, pihaknya sangat mendukung pembentukan Pansus Aset tersebut. Bahkan, anggota DPRD dari Fraksi PAN juga ikut menandatangani usulan pembentukan pansus tersebut dari 21 anggota yang sudah membutuhkan tanda tangannya.

Politisi daerah pemilihan Kabupaten Pontianak-Kubu Raya ini berharap, dengan dibentuknya Pansus Aset nantinya, semua persoalan aset baik aset tanah yang dipihakketigakan, dan termasuk aset berupa rumah dinas menjadi jelas.

Izhar mengungkapkan, ada sekitar 300 persil tanah yang belum bersertifikat. Dari pemprov beralasan BPN lambat, sementara, dari pihak BPN mengatakan pemprov masih keberatan dengan nilai atau angka rupiah biaya pembuatan sertifikat itu. Padahal, BPN juga menyatakan biaya itu masih bisa nego.

"Itu salah satu aset yang belum tertangani. Bahkan masih banyak pemanfaatan aset yang kurang berpihak ke kontribusi bagi daerah. Jika Pansus telah terbentuk, kita berkeinginan merekomendasikan anggaran pembuatan sertifikat itu," kata dia.

Pihaknya juga menyoroti perjanjian kerja sama pemanfaatan aset yang kurang berkeadilan. Izhar menambahkan, seperti ketika pembahasan Perda Retribusi, ada perjanjian yang lemah pada Resto Sari bento dalam hal kerja sama pemanfaatan aset milik daerah selama 30 tahun itu.

Perjanjian kerja sama itu, menurut dia, tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga sewa di tahun-tahun berikutnya. Seharusnya perjanjian itu berkeadilan, setiap lima tahun ada peninjauan kembali mengenai tarif atau harga sewa pemanfaatan aset itu.

Izhar menegaskan, pada prinsipnya, PAN sama seperti keinginan gubernur untuk mencapai penilaian WDP dari BPK. "Kita juga memiliki keinginan yang sama dengan gubernur untuk menuntaskan persoalan aset ini. Kita juga masih menunggu hasil audit aset dari BPK, karena sampai sekarang ini DPRD belum mendapatkan tembusannya," terang dia.

Persoalan aset ini juga menjadi perhatian serius Fraksi Partai Golkar. Andry Hudaya Wijaya, SH Sekretaris Fraksi Partai berlambang pohon beringin ini juga berkali-kali mengingatkan pemerintah provinsi agar segera menuntaskan persoalan aset.

Menurut dia, pengelolaan aset dan kekayaan daerah Kalbar sampai tahun keempat periode gubernur masih juga belum tuntas. Padahal aset adalah merupakan neraca dan modal pembangunan daerah. "Bagaimana anggaran pendapa-

tan dan belanja daerah bisa dijamin tingkat akuntabilitasnya kalau pengelolaan aset daerah masih tidak tertata dengan baik," sesal Andry.

Ketika pembacaan pemandangan umum fraksi terhadap LHP BPK, Fraksi ini menilai persoalan aset yang belum tuntas itu menunjukkan betapa lemahnya manajemen pemprov. Karena itu, Fraksi Golkar mendesak pembentukan Pansus Aset. Di dalam pansus ini, akan dikaji tentang masalah-masalah aset, termasuk kerjasama aset KONI dengan pihak ketiga.

Christianus Lumano, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalbar, Minggu (25/9) menjelaskan audit aset dari BPK sedang disusun dan masih berbentuk kerangka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). "Nanti tetap akan pemprov tindaklanjuti LHP BPK yang akan disampaikan itu," kata,

Dia menjelaskan, pemeriksaan aset itu agar permasalahan aset bisa selesai. Dan pada akhirnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa diraih pemerintah provinsi. Namun, dirinya masih enggan berkomentar mengenai keinginan DPRD Kalbar untuk membentuk Pansus Aset. (jul)